

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan muatan lokal di Indonesia sebenarnya sudah dirintis sejak tahun 1987 melalui keputusan Mendikbud nomor.0412/U/1987 tanggal 11 Juli 1987. Berdasarkan keputusan itu juga Dirjen Dikdasmen (Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah) mengeluarkan keputusan nomor. 173/C/Kep/M/87 tanggal 07 oktober 1987 tentang penjabaran penerapan muatan lokal kurikulum Sekolah Dasar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, penerapan kurikulum muatan lokal dipertegas lagi oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 dan Keputusan Mendikbud nomor 060/U/1993. Bahkan sekarang muatan lokal telah disempurnakan dan diperkuat melalui UU.No.20 Tahun 2003 dan PP.No. 19 Tahun 2005.¹ Kaitannya dengan implementasi di Sekolah Dasar di Indonesia acuan hukum dasarnya mengacu pada UUSPN No. 2/1989 Pasal 13 ayat 1²; pasal 37³, 38 ayat 1⁴, serta PP. No28/1990 Pasal 14 ayat 3 dan 4⁵; pasal 27^{6,7}

¹ Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, Remaja Rosdakarya Bandung, cet ke-4, 2014, hlm 204-205.

² Pasal 13 ayat 1 berbunyi: Pendidikan Dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.

³ Pasal 37 berbunyi: kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan Nasional, perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan.

⁴ Pasal 38 ayat 1 berbunyi: pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara Nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan, serta kebutuhan ;ingkungan dan ciri khas satuan pendidikan bersangkutan(<https://fp.ub.ac.id/kepegawaian/wp-content/uploads/2012/06/UU-No-2-tahun-1989-Sistem-Pendidikan-Nasional-.pdf>, diakses pada hari selasa, 3 April 2018 pukul 20.05).

⁵ Pasal 14 ayat 3 berbunyi Satuan Pendidikan Dasar dapat menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara Nasional dan tidak menyimpang dari tujuan Pendidikan Nasional. Ayat 4 berbunyi: Satuan Pendidikan Dasar dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dari mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.

Pada tahun 1994, kurikulum lokal juga sudah diberlakukan. Kurikulum lokal merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran yang ditetapkan oleh daerah atau lokal sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di daerah yang bersangkutan. Adanya perubahan dan perkembangan kurikulum pada dasarnya merupakan suatu upaya mengantisipasi perkembangan masyarakat itu sendiri.⁸

Perkembangan kurikulum selanjutnya terjadi pada tahun 2004, yaitu kurikulum KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). Dalam hubungannya dengan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar), proses belajar tidak hanya berlangsung di lingkungan sekolah, tetapi di lingkungan keluarga dan masyarakat.⁹

BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) 2006 dalam Panduan Penyusunan KTSP menjelaskan bahwa muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak sesuai atau terlalu banyak sehingga dijadikan mata pelajaran tersendiri. Subtansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan dan tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan.¹⁰ Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan penyempurnaan kurikulum 2004 (KBK). KTSP diwujudkan dalam bentuk standar kompetensi dan Kompetensi Dasar yang telah disahkan penggunaannya di Sekolah, baik negeri maupun swasta, yang diberlakukan secara bertahap pada tahun pelajaran 2006-2008, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

⁶ Pasal 27 berbunyi: Pengelola Satuan Pendidikan dapat bekerjasama dengan masyarakat, terutama dunia usaha dan para dermawan, untuk memperoleh sumber dana dalam rangka perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan. (http://simpuh.kemendiknas.go.id/regulasi/pp_28_90.pdf, diakses pada hari selasa, 3 April 2018 pukul 20.30).

⁷ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, Rajawali Pres, Jakarta, 2014, hlm 204.

⁸ Abdullah Idi, *Ibid*, , hlm 21.

⁹ Abdullah Idi, *Ibid*, hlm 22.

¹⁰ Zainal Arifin, *Op., cit.*, hlm 206.

Pemerintah Pusat (Depdiknas) mengharapkan paling lambat tahun pelajaran 2009-2010, semua sekolah telah menerapkan KTSP.¹¹

Muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang terdapat pada standar isi dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Keberadaan mata pelajaran muatan lokal merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang tidak terpusat, sebagai upaya agar penyelenggaraan pendidikan di setiap daerah lebih meningkat relevansinya terhadap keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.¹²

Muatan lokal mempunyai kedudukan yang penting, yaitu sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam KTSP dan merupakan salah satu komponen KTSP. Hal ini dapat dilihat dari struktur kurikulum KTSP yang terdiri atas: kelompok mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. “ Muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah”¹³. Melalui muatan lokal diharapkan penyelenggaraan pendidikan (sekolah) di daerah relevan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Selanjutnya, Pusat Kurikulum Balitbang Kemdiknas (2006) mengembangkan ruang lingkup muatan lokal adalah sebagai berikut: *pertama*, lingkup keadaan dan kebutuhan daerah. Keadaan daerah adalah segala sesuatu yang berada di daerah tertentu yang berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, ekonomi, dan lingkungan sosial budaya. Kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu daerah khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut yang disesuaikan dengan arah perkembangan daerah yang bersangkutan. *Kedua*, lingkup isi/jenis muatan lokal dapat berupa: bahasa asing (Inggris, Mandarin, Arab, dll), kesenian daerah, keterampilan daerah dan kerajinan daerah, adat istiadat,

¹¹ Abdullah Idi, *Op., cit.*, , hlm 232.

¹² Zainal Arifin, *Op., cit.*, hlm 206.

¹³ Peraturan Mendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Lampiran Bab II Bagian B. (Zainal Arifin, *Ibid* ,hlm 209)

dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan.¹⁴

Rapat kerja Nasional tentang pendidikan telah menggariskan secara kurikuler bahwa program muatan lokal dimasukkan dalam kurikulum. Alokasi waktu untuk melaksanakan program muatan lokal maksimal sebanyak 20% dari keseluruhan program kurikulum yang berlaku.¹⁵

Depdiknas (2006) menjelaskan mata pelajaran muatan lokal bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan perilaku kepada peserta didik agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai/aturan yang berlaku di daerahnya dan mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta pembangunan nasional.¹⁶

Muatan lokal merupakan mata pelajaran yang ada di sekolah.¹⁷ Sekolah merupakan bagian dari masyarakat, dimanapun ia berada. Seorang pendidik yang mengajar pada sekolah tertentu, di daerah tertentu, akan lebih memahami dan menguasai situasi dan kondisi daerahnya dibandingkan orang lain. Karenanya, seorang pendidik (guru) mestinya berusaha agar bahan pelajaran yang diberikan dapat diserap dengan mudah oleh anak didik, dan isi yang disampaikan bisa berguna bagi anak didik dan juga untuk kepentingan masyarakat.¹⁸

Antara lembaga pendidikan dengan masyarakat terjadi hubungan timbal balik. Pendidikan atau sekolah memberi manfaat kepada masyarakat begitu pula masyarakat memberikan dukungannya kepada sekolah. Hubungan seperti itu jelas menguntungkan kedua belah pihak. Manfaat pendidikan bagi masyarakat adalah untuk meningkatkan peranan mereka sebagai warga masyarakat, baik yang berkaitan dengan kewajiban maupun dengan hak mereka. Dalam rangka pendidikan seumur hidup misalnya,

¹⁴ Zainal Arifin, *Ibid*, hlm 209-210.

¹⁵ Abdullah Idi, *Op., cit*, hlm 210.

¹⁶ Zainal Arifin, *Konsep...*, hlm 208.

¹⁷ Khaeruddin, Mahfud Junaedi, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Center Madrasah Development 13 (MDC) dan Pilar Media*, Jogjakarta, 2007, hlm 113.

¹⁸ Abdullah Idi, *Op., cit*, hlm 212.

warga masyarakat bisa belajar tentang apa saja sesuai dengan minat dan bakat mereka, sehingga pemahaman, keterampilan tertentu, dan sikap mereka semakin meningkat.¹⁹

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mayoritas beragama Islam.²⁰ Karena mayoritas beragama Islam, maka masyarakat sangat membutuhkan kajian-kajian ke-Islaman yang salah satunya adalah untuk mengkaji sumber ajaran agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Pendidikan harus dapat memenuhi ataupun mencukupi dari kebutuhan masyarakat tersebut. Bahasa arab merupakan bahasa dari Al-Qur'an dan Hadits, maka dari itu, bahasa Arab menjadi sangat penting Untuk mempelajari bahasa Arab diperlukan beberapa ilmu bantu seperti ilmu Nahwu Shorof.

Di Jepara, ada lembaga setingkat MTs yang menerapkan mata pelajaran muatan loal Nahwu Shoroh. Lembaga ini adalah MTs Miftahul Huda Raguklampitan Batealit Jepara. MTs Miftahul Huda Raguklampitan adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang ada dibawah naungan Kementrian Agama yang diberikan kewenangan mengangkat muatan lokal yang berkembang di daerah tersebut. Muatan lokal yang diangkat di MTs Miftahul Huda Raguklampitan Batealit Jepara adalah Nahwu Shorof. Karena dianggap penting dan memang sangat perlu untuk diajarkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang tasrifan dan nahwu shorof. Maka dari itu, Peneliti memilih judul “ **Studi Analisis Pembelajaran Mata Pelajaran Muatan Lokal Nahwu Shorof Kelas VIII di MTs Miftahul Huda Raguklampitan Batealit Jepara Tahun Pelajaran 2018/2019**” sebagai bahasannya.

¹⁹ Made Pidarta, *Landasan Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm 169-171.

²⁰ Menurut hasil sensus tahun 2010, 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam, 6,96% Protestan, 2,9% Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Buddha, 0,05% Kong Hu Cu, 0, 13% agama lainnya, 0,38% tidak terjawab atau tidak ditanyakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. (https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia Diakses pada Jum'at, 27 April 2018 pukul 11.48 WIB)

B. Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif menetapkan pendidikan berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi, aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi dengan sinergis,²¹ maka dari itu, agar penelitian tidak melebar, penelitian difokuskan pada studi analisis pembelajaran mata pelajaran muatan lokal nahwu shorof kelas VIII di MTs Miftahul Huda Raguklampitan Batealit Jepara Tahun Pelajaran 2018/2019.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan focus penelitian yang telah ditetapkan tersebut, maka masalah yang muncul dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kurikulum Yang Digunakan Dalam Pembelajaran Mata Pelajaran Muatan Lokal Nahwu Shorof Kelas VIII Di Mts Mifatahul Huda Raguklampitan Batealit Jepara Tahun Pelajaran 2018/2019?
2. Bagaimana Metode Yang Digunakan Dalam Pembelajaran Mata Pelajaran Muatan Lokal Nahwu Shorof Kelas VIII Di Mts Mifatahul Huda Raguklampitan Batealit Jepara Tahun Pelajaran 2018/2019?
3. Bagaimana Media Yang Digunakan Dalam Pembelajaran Mata Pelajaran Muatan Lokal Nahwu Shorof Kelas VIII Di Mts Mifatahul Huda Raguklampitan Batealit Jepara Tahun Pelajaran 2018/2019?
4. Bagaimana Evaluasi Yang Digunakan Dalam Pembelajaran Mata Pelajaran Muatan Lokal Nahwu Shorof Kelas VIII Di Mts Mifatahul Huda Raguklampitan Batealit Jepara Tahun Pelajaran 2018/2019?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kauntitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2013, hlm 285

1. Mengetahui Kurikulum Yang Digunakan Dalam Pembelajaran Mata Pelajaran Muatan Lokal Nahwu Shorof Kelas VIII Di Mts Mifatahul Huda Raguklampitan Batealit Jepara Tahun Pelajaran 2018/2019
2. Mengetahui Metode Yang Digunakan Dalam Pembelajaran Mata Pelajaran Muatan Lokal Nahwu Shorof Kelas VIII Di Mts Mifatahul Huda Raguklampitan Batealit Jepara Tahun Pelajaran 2018/2019
3. Mengetahui Media Yang Digunakan Dalam Pembelajaran Mata Pelajaran Muatan Lokal Nahwu Shorof Kelas VIII Di Mts Mifatahul Huda Raguklampitan Batealit Jepara Tahun Pelajaran 2018/2019
4. Evaluasi Yang Digunakan Dalam Pembelajaran Mata Pelajaran Muatan Lokal Nahwu Shorof Kelas VIII Di Mts Mifatahul Huda Raguklampitan Batealit Jepara Tahun Pelajaran 2018/2019

E. Manfaat Penelitian

Jika manfaat penelitian dapat tercapai, maka hasil penelitian akan memiliki manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap khasanah intelektual dunia pendidikan Islam.
 - b. Agar dapat menambahkan wacana bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam strategi pembelajaran tasrifan dalam muatan lokal shorof
2. Secara Praktis
 - a. Bagi siswa

Dapat digunakan sebagai informasi untuk meningkatkan kemampuan awal siswa sehingga minat belajar dan prestasi belajar dapat meningkat.
 - b. Bagi guru

Sebagai masukan untuk mengoptimalkan Pembelajaran Mata Pelajaran Muatan Lokal Nahwu Shorof kelas VIII di MTs Miftahul Huda Raguklampitan Batealit Jepara Tahun Pelajaran 2018/2019.